



**LAPORAN  
KUNJUNGAN KERJA KOMISI IX DPR RI  
KE PROVINSI BALI  
PADA RESES MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2018-2019  
TANGGAL 2-6 MEI 2019**

**A. PENDAHULUAN**

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, yang merupakan salah satu fungsi yang dimiliki oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), sebagaimana diatur dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR-RI selalu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan dan program yang direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 58 ayat (4) huruf f Peraturan Tata Tertib DPR-RI menyatakan bahwa salah satu kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan DPR-RI adalah melalui kunjungan kerja. Untuk itu, Komisi IX DPR-RI dalam Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2018-2019 memutuskan untuk melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali.

Dalam pelaksanaan kunjungan kerja, Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan serta pengawasan obat dan makanan, mengharapkan mendapatkan masukan secara langsung, baik dari Pemerintah Daerah, mitra kerja maupun masyarakat umum tentang realisasi program dan anggaran yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan juga untuk memonitor pelaksanaan program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di daerah.

Selain itu, kunjungan kerja juga bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat terkait proses perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang dan tugas Komisi IX DPR RI. Hasil kunjungan kerja akan menjadi bahan pembahasan dengan kementerian terkait dan mitra kerja lainnya.

## **B. Dasar Kegiatan**

Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ini dilaksanakan berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, Pasal 61 ayat (1), Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 100. Selain itu, Pasal 59 ayat (3) huruf f yang menyebutkan bahwa Komisi dapat mengadakan kunjungan kerja spesifik dalam masa sidang, untuk kemudian hasilnya akan dilaporkan dalam rapat komisi untuk ditindak lanjuti.

## **C. Maksud dan Tujuan**

Tujuan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali ini yaitu:

1. Menjalankan fungsi pengawasan DPR terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan dalam lingkup tugas Komisi IX DPR RI.
2. Untuk meninjau secara langsung pelaksanaan program pemerintah yang membidangi Komisi IX DPR RI terkait kesehatan, ketenagakerjaan dan yang lainnya.
3. Mendapatkan informasi realisasi program dan anggaran yang dibiayai APBN.
4. Mendapatkan gambaran secara komprehensif tentang permasalahan masyarakat dan memonitor pelaksanaan program Instansi/Badan mitra kerja Komisi IX DPR RI di Provinsi Bali.
5. Menyerap aspirasi masyarakat Provinsi Bali terkait proses perumusan kebijakan pemerintah pusat yang berkaitan dengan bidang tugas Komisi IX DPR RI.

## **D. Keluaran**

Rekomendasi Komisi IX DPR RI yang diharapkan menjadi:

1. Mendapatkan masukan bagi mitra kerja Komisi IX DPR RI selanjutnya ditindak menjadi bahan pembahasan Komisi IX DPR RI bersama mantra terkait.
2. Sebagai landasan untuk meningkatkan kinerja dan pelaksanaan program-program pemerintah sesuai target dan realisasi mitra kerja Komisi IX DPR RI.

## **E. Kegiatan yang dilaksanakan**

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali di damping oleh:

1. Gubernur Provinsi Bali
2. Dinas Kesehatan Provinsi Bali
3. Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Bali
4. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Provinsi Bali
5. Balai POM Provinsi Bali
6. BKKBN Provinsi Bali

Selain melakukan pertemuan tim kunjungan kerja Komisi IX juga telah melakukan peninjauan ke beberapa lokasi diantaranya:

1. Puskesmas I Denpasar Utara Jl. Kamboja No.2, Dangin Puri Kangin, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Bali
2. BLK Provinsi Bali Jl. Raya Puputan No.23, Dangin Puri Klod, Denpasar Tim., Kota Denpasar, Bali 80234; dan
3. BPOM Provinsi Bali Jl. Cut Nyak Dien No.5, Panjer, Denpasar Sel., Kota Denpasar, Bali

#### **F. Waktu Pelaksanaan**

Kungker Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 2-6 Mei 2019.

#### **G. Peserta**

Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali diikuti oleh (*data terlampir*) anggota Komisi IX DPR RI, dengan dipimpin oleh Bapak Saleh P. Daulay.

Adapun susunan lengkap anggota rombongan Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali yaitu:

NO URUT	NAMA	JABATAN	FRAKSI
1.	DR. SALEH PARTAONAN DAULAY, M. Ag, M. Hum, MA	KETUA TIM/ WAKIL KETUA KOMISI	F-PAN
2.	Dra, Hj, ERMALENA, MHS	WAKIL KETUA KOMISI	F-PPP
3.	Hj. ELVA HARTATI, S.IP., MM	ANGGOTA	F-PDIP
4.	Ir. KETUT SUSTIAWAN	ANGGOTA	F-PDIP
5.	dr. RIBKA TJIPTANING	ANGGOTA	F-PDIP
6.	NURMANSAH E. TANJUNG	ANGGOTA	F-PDIP
7.	H. IMAM SUROSO, SH., S.Sos., MM.	ANGGOTA	F-PDIP
8.	DR. DEWI ARYANI, S.Sos, M.Si	ANGGOTA	F-PDIP
9.	Ir. BUDI YUWONO, DIPL, SE	ANGGOTA	F-PDIP

NO URUT	NAMA	JABATAN	FRAKSI
10.	ABIDIN FIKRI, SH.	ANGGOTA	F-PDIP
11.	MARINUS GEA, SE, M.Ak	ANGGOTA	F-PDIP
12.	DELIA PRATIWI Br. SITEPU, SH	ANGGOTA	F-PG
13.	BETTI SHADIQ PASADIGOE, SE, Ak, MM	ANGGOTA	F-PG
14.	IMANUEL EKADIANUS BLEGUR	ANGGOTA	F-PG
15.	Drs. JULIANUS POTE LEBA, M.Si	ANGGOTA	F-PG
16.	drg. PUTIH SARI	ANGGOTA	F-GERINDRA
17.	H. BAMBANG RIYANTO, SH, MH, M.Si	ANGGOTA	F-GERINDRA
18.	Drs. H. ZULFIKAR ACHMAD	ANGGOTA	F-PD
19.	dr. VERNA GLADIES MERRY INKIRIWANG	ANGGOTA	F-PD
20.	Hj. ALIYAH MUSTIKA ILHAM, SE.	ANGGOTA	F-PD
21.	H. HAERUDIN, S.Ag., MH	ANGGOTA	F-PAN
22.	Ir. H. AHMAD RISKI SADIG	ANGGOTA	F-PAN
23.	Dra. Hj. SITI MASRIFAH, MA	ANGGOTA	F-PKB
24.	H. AHMAD ZAINUDIN, Lc	ANGGOTA	F-PKS
25.	dr. H. ADANG SUDRAJAT, MM. AV.	ANGGOTA	F-PKS
26.	Hj. KARTIKA YUDHISTI, B.Eng, M.Sc	ANGGOTA	F-PPP
27.	IRMA SURYANI CHANIAGO, SE.	ANGGOTA	F-NASDEM
28.	AMELIA ANGGRAINI	ANGGOTA	F-NASDEM

## H. Gambaran Umum Provinsi Bali

### ▪ Keadaan Geografis

Bali adalah salah satu provinsi di Indonesia. Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya adalah Denpasar. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 253 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" - 08°50'48"LS dan 114°25'53" - 115°42'40"BT. Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan adalah 5.636,66 km<sup>2</sup> atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng, Karangasem, dan Kota Denpasar.

## ▪ **Gambaran Umum Dimensi Kesehatan Provinsi Bali**

Untuk memiliki derajat kesehatan yang tinggi, diperlukan pencapaian tingkat kesehatan tertentu yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan yang sehat, mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta mampu menyediakan dan memanfaatkan (menjangkau) pelayanan kesehatan yang bermutu. Perilaku yang sehat dan kemampuan masyarakat untuk memilih dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu sangat menentukan keberhasilan pembangunan kesehatan.

## ▪ **Status Gizi Balita**

Secara umum prevalensi gizi buruk di provinsi Bali adalah 3,2% dan prevalensi giziburuk + kurang 11,4%. Sebanyak 3 kabupaten/kota masih memiliki prevalensi giziburuk di atas prevalensi provinsi. Enam kabupaten/kota lainnya yaitu sudah berada dibawah prevalensi provinsi. Ke 6 kabupaten/kota tersebut adalah: Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli dan kota Denpasar. Bila dibandingkan dengan target pencapaian program perbaikan gizi (RPJM) tahun 2015 sebesar 20% dan target MDG untuk Indonesia sebesar 18,5%, maka secara nasional target-target tersebut sudah terlampaui. Prevalensi obesitas sentral untuk tingkat provinsi Bali adalah 16,4%. Dari 9 kabupaten/kota, 4 kabupaten/kota di antaranya memiliki prevalensi obesitas sentral diatas angka prevalensi provinsi yaitu Denpasar 24,3%, kab. Tabanan 18,2%, Gianyar 18,0% dan kab. Jembrana 17,2%. Prevalensi masalah pendek pada balita secara nasional masih tinggi yaitu sebesar 36,8%. Namun di provinsi Bali sebesar 31,0%, Lima kabupaten/kota memiliki prevalensi masalah pendek di atas angka provinsi. Di provinsi Bali, prevalensi masalah pendek 31% dan kategori normal 69,0%. Prevalensi anak balita kategori masalah pendek tertinggi di kabupaten Karang Asem (39,0%), disusul Bangli (37,6%), kabupaten Buleleng (35,4%).

Prevalensi Risiko KEK pada wanita umur 15-45 tahun di provinsi Bali 8,6%, ada empat kabupaten/kota yang mempunyai prevalensi di atas angka provinsi Bali yaitu: kabupaten Karang Asem 12,2%, kabupaten Tabanan 10,8%, kabupaten Jembrana 9,3%, dan kabupaten Badung 9,0%.

Akses dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Akses RT menuju pelayanan kesehatan (RS, puskesmas, bidan dan dokter praktek) menurut jarak di berbagai kabupaten/kota di provinsi Bali tidak berbeda jauh, jarak >5KM ke yankes tertinggi di kabupaten Karang Asem (14,7%), kemudian kabupaten Jembrana

(11,4%). Menurut waktu tempuh selama >60 menit ke yankes prevalensitertinggi di kabupaten Karang asem (9,1%), kabupaten Klungkung (3,3%), Sedangkan waktu tempuh selama 31-60 menit tertinggi kabupaten Karang Asem (13,1%), kabupaten Tabanan (5,9%). Akses RT ke pelayanan UKBM menurut jarak dan waktu tempuh antar kabupaten/kota diprovinsi Bali tidak jauh berbeda, hanya beberapa kabupaten seperti Karang Asem (50,0%) dan Jembrana (67,8%) persentase jarak tempuh <1 km paling rendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Persentase Akses RT ke pelayanan UKBM dengan jarak 1-5 Km tertinggi di kabupaten Karang asem (47,1%), kabupaten Jembrana (30,8%), sedangkan dengan jarak >5 KM tertinggi di kabupaten Bangli (2,9%), kabupaten Jembrana (1,4%). Persentase tertinggi akses RT ke pelayanan UKBM dengan waktu tempuh 60 menit tertinggi di kabupaten Karang Asem (3,3%). Mayoritas RT merasa tidak membutuhkan posyandu/poskesdes persentase tertinggi di Kota Denpasar (83,5%). Ada banyak faktor penyebabnya, diantaranya disebabkan karena mereka merasa tidak memiliki balita. Sebetulnya fungsi posyandu/poskesdes tidak hanya berfungsi untuk kesehatan balita, tapi dapat juga berfungsi yang lain seperti, pengobatan, KB bahkan konsultasi resiko penyakit. Pemanfaatan POD/WOD tiap kabupaten cukup bervariasi namun masih dibawah 20 % Rerata di prov. Bali 4,2%). Pemanfaatan tertinggi pada kabupaten Buleleng (19,7%). Sehingga perlu adanya penelusuran alasan tidak memanfaatkan POD/WOD.

Cakupan Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Provinsi Bali sampai dengan minggu ke V bulan Oktober 2016 sebanyak 2.190.178 jiwa (51,81%) dari total penduduk sebanyak 4.227.711 Jiwa. Adapun fasilitas Kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan Sampai dengan bulan Oktober 2016 terdapat 548 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di wilayah Provinsi Bali yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Untuk Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) sampai dengan bulan Oktober 2016 jumlah RS yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan sebanyak 45 FKRT.

#### ▪ **Angkatan Kerja Provinsi Bali**

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Bali pada Februari 2018 mencapai 2.607.288 orang bertambah 138.184 orang dibanding angkatan kerja Februari 2017 (2.469.104 orang) atau bertambah 172.838 orang dibanding angkatan kerja



Agustus 2017 (2.434.450 orang). Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Bali sebesar 0,86 persen.

Jumlah penduduk yang bekerja di Bali Februari 2018 mencapai 2.584.943 orang bertambah 147.449 orang dibandingkan keadaan Februari 2017 (2.437.494) atau bertambah 186.636 orang dibandingkan keadaan Agustus 2017 (2.398.307 orang).

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Bali pada Februari 2018 mencapai 0,86 persen, mengalami penurunan 0,42 poin dibandingkan TPT Februari 2017 (1,28 persen) atau mengalami penurunan 0,62 poin dibandingkan dengan TPT Agustus 2017 (1,48 persen)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Februari 2018 mencapai 79,83 persen naik 2,96 poin dibandingkan Februari 2017 (76,87 persen) atau naik 4,59 poin dibandingkan Agustus 2017 (75,24 persen).

Pada Februari 2018, jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal mencapai 48,12 persen, terdiri dari pekerja yang berstatus sebagai buruh/karyawan/pegawai mencapai 44,12 persen dan pekerja yang berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tetap/dibayar mencapai 4,00 persen. Sementara penduduk yang bekerja disektor informal mencapai 51,88 persen, terdiri dari berusaha sendiri 15,64 persen, berusaha dibantu buruh tidak tetap 17,00 persen, pekerja bebas 5,70 persen dan pekerja keluarga 13,54 persen.

## **BAB II**

### **HASIL KUNJUNGAN KERJA**

Berdasarkan hasil kunjungan kerja di Provinsi Bali dapat dilihat bahwa proses pembangunan yang ada di Provinsi Bali meliputi bidang kesehatan dan ketenagakerjaan masih rendah. Beberapa pokok yang menjadi perhatian adalah:

#### **Bidang Kesehatan**

Secara umum upaya kesehatan terdiri atas dua unsur utama, yaitu kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan. Upaya kesehatan masyarakat adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat sertaswasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah

dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan di masyarakat. Upaya kesehatan masyarakat mencakup upaya-upaya promosi kesehatan, pemeliharaan kesehatan, pembrantasan penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular, penyehatan lingkungan dan penyediaan sanitasi dasar, perbaikan gizi masyarakat, kesehatan jiwa, pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, pengamanan penggunaan zat adiktif dalam makanan dan minuman, pengamanan narkotika, psikotropika, zat adiktif berbahaya, serta penanggulangan bencana dan bantuan kemanusiaan.

Di Provinsi Bali Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka Kematian Ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan ke-5 pembangunan millenium (SDGs) yaitu meningkatkan kesehatan ibu dimana target yang akan dicapai sampai tahun 2015 adalah mengurangi sampai 3/4 resiko jumlah kematian ibu. Dari hasil survei yang dilakukan dan juga data capaian program, AKI di provinsi Bali telah menunjukkan penurunan dari waktu ke waktu.

Tahun 2015 menurun menjadi 0 kematian padatahun 2016 yaitu 115 per 100.000 kelahiranhidup (70orang) dan tahun 2017angka kematian ibu 50 per 100.000 kelahiran hidup (3 Orang). Walaupun demikian untuk mewujudkan target tujuan pembangunan millenium masih membutuhkan komitmen dan usaha keras yang terus menerus

Adapun terjadinya penurunan kematian Ibu untuk tahun 2017 sebagai imbas dari beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan. Untuk tahun 2017 telah melakukan serangkaian upaya dalam rangka menurunkan AKI diantaranya :

- a. Menerapkan prgram perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi pada semua ibu hamil.
- b. Memantapkan pelaksanaan PONED dan PONEK
- c. Meningkatkan kemitraan Bidan dengan Bidan lainyad)
- d. Pemenuhan sumber daya manusia kesehatan yang kompeten dan berkualitas)
- e. Meningkatkan pelayanan Ante Natal Care yang berkualitas dan terpadu serta tindakan berencana dalam mengatasi masalah kesehatan ibu dan bayi baru lahir.
- f. Melakukan monitoring-evaluasi dan supervisi



Di Bidang BPJS Kesehatan Pemprov Bali mendaftarkan sebanyak 400.749 jiwa penduduk Bali yang miskin dan tidak mampu menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN-KIS. Jumlah ini meliputi 25.326 warga Kab. Jembrana, 56.240 warga Kab. Tabanan, 48.457 warga Kab. Gianyar, 19.907 warga Kab. Klungkung, 38.465 warga Kab. Bangli, 84.323 warga Kab. Karangasem, 117.439 warga Kab. Buleleng, serta 10.592 warga Kota Denpasar.

Dengan dikeluarkannya pergub tersebut, kini lebih dari 95 persen masyarakat Bali sudah terlayani JKN dan secara otomatis terintegrasi ke JKN-KBS. Selain itu, puskesmas telah dimaksimalkan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat ditambah penyempurnaan pada sistem, riwayat kesehatan dan layanan *online* melalui aplikasi.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, dr. Ketut Suarjaya menyampaikan kelebihan-kelebihan JKN-KBS di luar layanan yang telah di-*cover* sebelumnya melalui program JKN oleh BPJS kesehatan. Salah satunya adalah pelayanan transportasi gratis bagi pasien *emergency* ke rumah sakit serta angkutan gratis untuk jenazah dari puskesmas atau rumah sakit menuju rumah. Selain itu juga diperkuat dengan sistem informasi (SI-KBS) berupa sistem informasi kesehatan berbasis kecamatan yang disusun dengan sistem aplikasi untuk memudahkan layanan informasi kepada masyarakat. JKN-KBS dianggarkan dan akan terlaksana maksimal melalui anggaran perubahan 2019 dan dalam perlaksanaannya penganggaran akan di-*share* antara pemprov dan pemkab dengan pembagian 51 % Pemprov dan 49 % Pemkab. Kecuali untuk Kabupaten Badung dan Denpasar sudah bisa dianggarkan secara mandiri sedangkan Kabupaten Gianyar persentasenya 40 % pemprov dan 60 % pemkab.

Sedangkan untuk tingkatannya, pelayanan bagi peserta PBI disediakan ruang perawatan kelas III sedangkan peserta pekerja penerima upah (PPU) dan peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) atau peserta mandiri mendapatkan pelayanan sesuai dengan tingkatan dalam JKN-BPJS Kesehatan. Selain itu menyiapkan segala sarana-prasarana serta SDM yang kompeten guna mendukung program JKN-KBS ini terlebih untuk Puskesmas yang jadi tempat pelayanan masyarakat di daerah.

Pada November tahun 2016 pun BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 19.536 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dalam hal ini Dokter Praktik

Perorangan, Klinik Pratama dan Puskesmas. Juga sebanyak 5.084 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) dalam hal ini meliputi rumah sakit, apotek dan optik di seluruh Indonesia.

## **BKKBN**

Di bidang BKKBN penjelasan Gubernur Bali jumlah kelahiran di Bali dan warga yang meninggal hampir berimbang di seluruh kabupaten. Ia berpendapat sebenarnya Mars Keluarga Berencana tidak menyinggung soal pengurangan jumlah atau banyak anak yang penting adalah bagaimana membangun keluarga yang sehat, cerdas, kuat, dan sejahtera.

Program keluarga berencana dua anak di Bali relatif berhasil, tetapi yang menyedihkan ke depan tak ada lagi nama anak ketiga dan keempat yakni Nyoman dan Ketut. Dalam programnya ia berencana mengubah paradigma kependudukan di Bali dengan tidak lagi fokus pada pengurangan jumlah anak, tetapi bagaimana membangun keluarga berkualitas dan direncanakan dengan baik. Berharap dengan paradigma ini melahirkan generasi yang sehat, cerdas, kuat, berdaya saing, produktif dan berkontribusi.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali melaporkan laju pertumbuhan penduduk Bali menurun dari 2,31% pada 2010 menjadi 2,14% pada 2017. Selain itu terjadi pula penurunan angka kelahiran total dari 2,3 pada 2012 menjadi 2,1 per wanita usia subur pada 2018. Penurunan ini selain sebagai dampak penggunaan kontrasepsi yang telah mencapai 54,8% bagi pasangan usia subur, juga meningkatnya media usia kawin pertama perempuan dari 21,9 tahun menjadi 22,1 tahun.

## **Bidang Ketenagakerjaan**

Profil ketenagakerjaan di Provinsi Bali per Agustus 2018 :

- a. Jumlah penduduk usia kerja mencapai 3.288.908 orang dari penduduk usia kerja tersebut 76,78% (2.525.355 orang) merupakan angkatan kerja dan 23,22% (763.563 orang) merupakan bukan angkatan kerja.
- b. Angkatan kerja bertambah 90.905 orang (3,73%) dibanding angkatan kerja agustus 2017 (2.434.450 orang) atau berkurang 81.933 orang (3,14%) dibanding angkatan kerja Februari 2018 (2.607.288 orang).

- c. Jumlah penduduk yang bekerja mencapai 2.490.870 orang bertambah 92.563 orang (3,86%) dibandingkan keadaan agustus 2017 (2.398.307 orang) atau berkurang 94.073 orang (3,64%) dibandingkan keadaan Februari 2018 sebesar (2.584.943 orang)
- d. Tingkat pengangguran terbuka di Bali mencapai 1,37% mengalami penurunan 0,11 poin dibandingkan TPT Agustus 2017 (1,48%) atau mengalami kenaikan 0,51 poin dibandingkan dengan TPT Februari 2018 (0,86%)
- e. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja mencapai 76,78% naik 1,54 poin dibandingkan Agustus 2017 (75,24%) atau turun 3,05 poin dibandingkan Februari 2018 (79,83%).
- f. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor formal mencapai 50,37% terdiri dari :
  - Pekerja yang berstatus buruh/ karyawan/ pegawai mencapai 45,96%
  - Pekerja yang berstatus sebagai berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar mencapai 4,41%
- g. Jumlah penduduk yang bekerja di sektor informal mencapai 49,63% terdiri dari :
  - Berusaha sendiri 14,03%
  - Berusaha dibantu buruh tidak tetap 16,32%
  - Pekerja bebas pertanian 3,01%
  - Pekerja bebas non pertanian 4,50%
  - Pekerja keluarga 11,78%

Upaya-upaya Pemerintah Provinsi Bali terhadap peningkatan IPM melalui pelatihan keterampilan tenaga kerja di Disnakeresdm meliputi :

- a. Pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan di UPTD. BLKIP Bali (2019 → 28 Paket, 1 paket = 16 orang) dengan kejuruan :
  - pariwisata (tata boga, tata hidangan, tata graha)
  - teknik pendingin
  - otomotif (sepeda motor konvensional)
  - elektronika (service tv, radio, hp)
  - tata niaga (bahasa inggris, bahasa jepang, dan administrasi perkantoran)
  - aneka kejuruan (Spa, tata rias, menjahit, processing hasil pertanian)

- b. Pelatihan Mobile Training Unit (MTU) (2019 >> 18 paket, 1 paket = 16 orang) yang dilaksanakan di desa-desa selama 1 bulan (240 JP) meliputi kejuruan :
- tata rias
  - menjahit
  - processing hasil pertanian
  - otomotif (sepeda motor konvensional)
  - elektronika (service tv, radio, hp)
- Jadi total yang dilatih oleh UPTD. BLKIP Bali tahun anggaran 2019 sebanyak 44 paket dengan jumlah peserta 704 orang
- c. Pelatihan pemagangan berbasis pengguna di bidang pariwisata kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja swasta yang dilaksanakan selama 9 bulan terbagi menjadi 3 bulan di lembaga pelatihan kerja (LPK) dan 6 bulan pemagangan di industri untuk kejuruan :
- tata boga (sebanyak 3 paket, 1 paket = 20 orang)
  - tata hidangan (sebanyak 3 paket, 1 paket = 20 orang)
  - tata graha (sebanyak 3 paket, 1 paket = 20 orang)
- Jadi total pelatihan pemagangan berbasis pengguna tahun anggaran 2019 sebanyak 9 paket dengan jumlah peserta 180 orang
- d. Sertifikasi kompetensi meliputi :
- Sertifikasi terhadap tenaga kerja di sektor pariwisata untuk kejuruan tata boga, tata hidangan, tata graha dan kantor depan (sebanyak 96 orang)
  - Sertifikasi untuk lulusan pelatihan di BLKIP dan pelatihan pemagangan (sebanyak 48 orang)
  - Sertifikasi untuk peserta pelatihan pemagangan (sebanyak 180 orang)
- Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dilaksanakan di perusahaan (3 paket, 1 paket = 20 orang).
- Selain itu mekanisme penempatan PMI ke luar negeri
  - PMI di Provinsi Bali dengan kategori formal dan memiliki skill baik yang diberangkatkan oleh PPTKIS maupun perseorangan, selalu diawali dengan adanya Job Order yang diendorse oleh KBRI di negara tujuan penempatan, sehingga validasi lowongan kerja diketahui dan disetujui oleh pejabat yang berwenang di negara penempatan. Selanjutnya PPTKIS mengajukan Surat Izin

Pengerahan (SIP) ke BNP2TKI, Surat Pengantar Rekrut (SPR) ke Pemerintah Provinsi, Rekomendasi Paspor ke Kabupaten/Kota, Paspor ke Imigrasi, mendaftar melalui e-KTKLN, dan sebelum berangkat mendapatkan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) yang dilakukan bersama-sama antara Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dengan BP3TKI.

- 
- Sementara itu langkah-langkah yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kualitas SDM sehingga dapat bersaing dengan TKA adalah peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
- Pelatihan kerja dan sertifikasi kompetensi kerja merupakan bagian penting dari investasi sumber daya manusia yang berkualitas dan dalam persaingan global, kompetensi sangat penting sebagai bukti otentik yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 
- Oleh karena itu Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong agar tenaga kerja Bali memiliki sertifikasi kompetensi sehingga diakui dan dapat bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari negara lain.
- Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah terkait pengendalian Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia sekaligus mampu mendorong pekerja Indonesia agar mampu bersaing dengan pekerja asing.
- 
- Bali yang merupakan destinasi pariwisata dimana sektor pariwisata merupakan andalan sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) membutuhkan tenaga kerja yang kompeten di bidang pariwisata untuk dapat memenuhi peluang kerja di sektor tersebut.
- 
- Dengan memperhatikan tuntutan akan tersedianya tenaga kerja terdidik, terlatih dan mempunyai etos kerja maka sertifikasi kompetensi tenaga kerja di bidang pariwisata merupakan kebutuhan mendesak guna meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global. Sertifikasi Kompetensi tenaga kerja tentunya akan lebih efektif dan efisien apabila dilakukan oleh lembaga yang memenuhi persyaratan dan memiliki akses kepada pengguna tenaga kerja.

- Tenaga kerja yang kompeten tersebut dapat dihasilkan oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang menerapkan program Competency Based Training (CBT) atau Program Berbasis Kompetensi (PBK) dimana pelatihannya akan menekankan pada kompetensi kerja dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja. Di samping itu selain mampu melakukan pelatihan, LPK juga harus mampu menempatkan dan mensertifikasi lulusannya, atau lebih dikenal dengan Program *Three In One* (Pelatihan, Sertifikasi dan Penempatan).

Provinsi Bali memiliki BLK dengan Nomenklatur adalah UPTD BLK – IP.

Alokasi anggaran dari APBD dan APBN.

Untuk Tahun 2019      APBD : 3,090,134,700

                                     APBN : 2,705,888,000

- a. Program kegiatan pelatihan di UPTD BLK - IP yaitu melaksanakan kegiatan pelatihan baik berbasis masyarakat maupun berbasis kompetensi menjangkau dan meningkatkan keahlian peserta. Dengan sasaran pelatihan sesuai triple skilling, tidak memandang level pendidikan, dan tidak mensyaratkan batasan umur. Dari 16 th – 58 th jadi menjangkau sasaran masyarakat di level pendidikan terendah.
- b. Fasilitas yang dimiliki UPTD BLK – IP :
  - gedung kantor
  - workshop pariwisata
  - workshop teknik pendingin
  - workshop elektronika
  - workshop otomotif
  - workshop tata niaga
  - workshop aneka kejuruan
- c. Tenaga Instruktur yang dimiliki sebanyak 9 orang yaitu:
 

1) Kejuruan Administrasi Perkantoran	: 1 Orang
2) Kejuruan Teknik Pendingin	: 2 Orang
3) Kejuruan Pariwisata	: 2 Orang
4) Kejuruan Otomotif	: 1 Orang
5) Kejuruan Elektronika	: 1 Orang
6) Aneka Kejuruan	: 2 Orang



- Peserta yang dilatih dalam tahun 2016 sebanyak 912 orang dan yang sudah bekerja/berwirausaha sebanyak 896 orang (98,25 %)
- Peserta yang dilatih dalam tahun 2017 sebanyak 512 orang dan yang sudah bekerja/berwirausaha sebanyak 474 orang (92,58 %)
- Peserta yang dilatih dalam tahun 2018 terdapat 51 paket pelatihan, yatu dari dana APBD sebanyak 23 paket dan dari dana APBN sebanyak 28 paket. Secara keseluruhan semua paket dapat dilaksanakan, dan pada akhir pelatihan dilaksanakan *On The Job Training (OJT)*. Untuk persentase serapan/ yang sudah bekerja sedang dilaksanakan monev ke perusahaan/ hotel. Datanya diketahui pada akhir tahun anggaran 2019.

## **I. PENUTUP**

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI ke Provinsi Bali ini kami sampaikan.

Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

JAKARTA, MEI 2019  
KETUA TIM KUNKER KOMISI IX DPR-RI

ttd

DR.H.SALEH PARTAONAN DAULAY, M.Ag, M.Hum, MA  
A-460